

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada umumnya setiap negara di dunia memiliki tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui tercapainya tujuan pembangunan ekonomi. Diharapkan hasil dari pembangunan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara adil dan merata. Tujuan pembangunan ekonomi tidak akan tercapai, apabila terjadi ketidakmerataan distribusi pendapatan masyarakat. Artinya, hanya sebagian kecil dari seluruh masyarakat yang dapat menikmati hasil pembangunan ekonomi (Rubiarko, 2013).

Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang memiliki tujuan utama dalam pembangunan ekonominya, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan bermacam karakteristik dan keragaman antar daerahnya. Hal tersebut berpengaruh pada kemampuan pembangunan daerah yang tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan daerah lainnya, sehingga menimbulkan ketimpangan antar wilayah. Selama pertumbuhan ekonomi dan hasil dari pembangunan dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat, maka masalah ketidakmerataan ekonomi tidak akan muncul (Oka *et al.*, 2015).

Peningkatan pertumbuhan ekonomi tanpa diiringi oleh pemerataan ekonomi, maka dapat menyebabkan lebarnya kesenjangan antar golongan masyarakat. Sebaliknya apabila pemerataan ekonomi tanpa pertumbuhan ekonomi, akan meningkatkan angka kemiskinan suatu daerah. Pertumbuhan

dan pemerataan ekonomi merupakan hal kompleks, yang perlu diperhatikan namun cenderung sulit diwujudkan dalam waktu yang bersamaan. Pengutamakan pertumbuhan akan menuntut dikorbankannya pemerataan, begitu sebaliknya (Rubiarko, 2013).

Pembangunan dalam lingkup Provinsi secara parsial tidak selalu disertai dengan pemerataan. Daerah – daerah tersebut mengalami ketimpangan dikarenakan adanya perbedaan Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), letak administratif dan infrastruktur yang dimiliki oleh setiap daerah. Serta pembangunan yang cenderung terpusat pada daerah yang sudah maju. Dimana indikator ketimpangan ekonomi yaitu perbedaan pendapatan per kapita, tingkat pendapatan antar kelompok dan tingkat pendapatan antar wilayah. Pendapatan per kapita suatu daerah dapat dihitung dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibagi dengan jumlah penduduk di suatu daerah atau dapat dikatakan PDRB per kapita. Jika semakin besar PDRB per kapita, maka semakin meningkat kesejahteraan masyarakatnya. Dan jika masyarakat suatu daerah dikatakan sejahtera, maka pertumbuhan ekonominya juga baik (Iswanto, 2015).

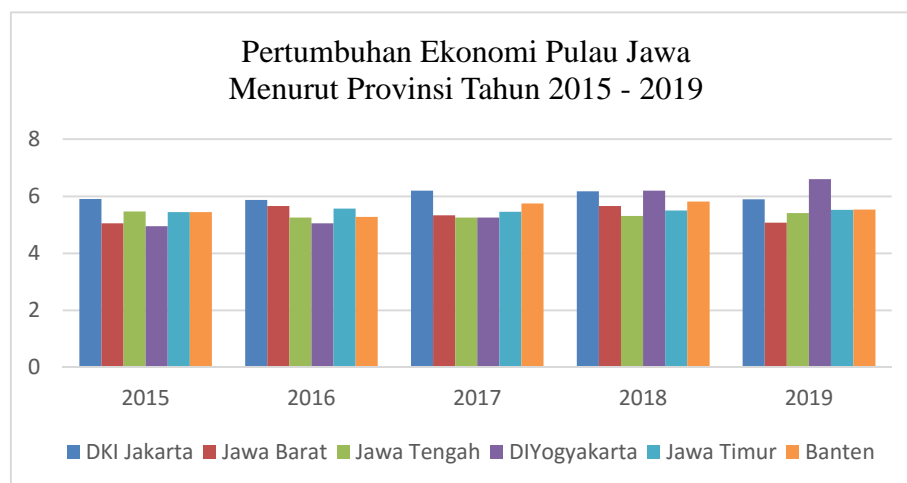
Mengidentifikasi potensi sektor yang dimiliki setiap daerah merupakan hal terpenting dalam pembangunan daerah, kemudian dianalisis untuk membuat sektor tersebut memiliki nilai tambah. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan penduduknya, sehingga salah satu upaya yang dilakukan yaitu melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi (Aminah, 2017).

Melihat kinerja pembangunan Indonesia dari segi spasial, hal ini menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan provinsi lain di luar Pulau

Jawa, secara umum provinsi Jawa berkembang lebih cepat. Perbedaan pembangunan antar daerah menyebabkan perbedaan kesejahteraan dan kemajuan antar daerah, terutama antara wilayah Indonesia bagian barat (KBI) dan wilayah Indonesia bagian timur (KTI), serta wilayah di luar Jawa dan Jawa. Ketidakmerataan juga terjadi antar provinsi di Pulau Jawa, meskipun Pulau Jawa merupakan motor penggerak perekonomian di Indonesia. Ketimpangan pembangunan antar provinsi dapat dilihat dari perbedaan tingkat kesejahteraan (PDRB Per Kapita) dan pertumbuhan ekonominya (Sukwika, 2018).

Pulau Jawa merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Selain itu pusat ekonomi dan pemerintahan berada di pulau Jawa, yang membuat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya. Sebagai daerah yang mempunyai PDRB tertinggi, maka perkembangan perekonomian juga terus mengalami peningkatan.

Gambar 1.1
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 - 2019



Sumber : (BPS, 2020) (data diolah)

Berdasarkan grafik 1.1 di atas menunjukkan bahwa dari enam provinsi di Pulau Jawa, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur cenderung mengalami fluktuatif. Pada tahun 2015 memiliki nilai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,44% meningkat menjadi 5,57% pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2017 menurun sebesar 5,46%. Tetapi pada tahun 2018 kembali meningkat sebesar 5,5% dan tahun 2019 sebesar 5,52%.

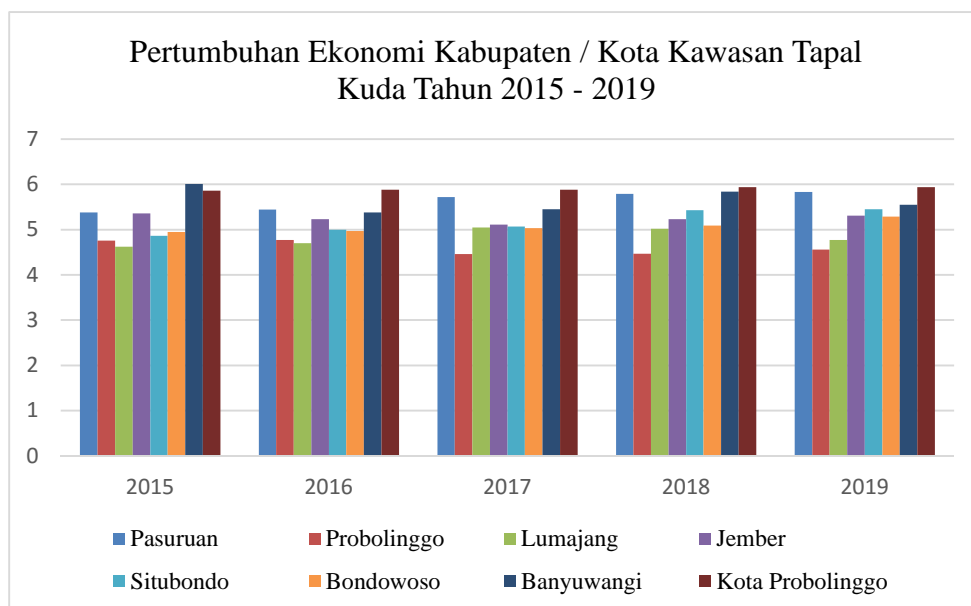
Provinsi Jawa Timur memiliki 29 kabupaten dan 9 kota dengan potensi yang berbeda - beda. Kabupaten dan kota tersebut di tuntut untuk memiliki sarana dan prasarana yang lengkap untuk mendukung proses pembangunan daerah, melalui perbaikan infrastruktur dan sumber daya manusia yang berkualitas. Kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berbeda karena laju pertumbuhan antar kabupaten dan kota di Jawa Timur yang beragam, yang kemudian menyebabkan perbedaan pendapatan yang diterima di setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur. Perbedaan ini mengakibatkan terjadinya disparitas atau ketimpangan regional (Iswanto, 2015).

Tapal kuda merupakan sebuah kawasan yang terletak di bagian timur Provinsi Jawa Timur. Kawasan ini dinamakan tapal kuda dikarenakan bentuk kawasan tersebut di dalam peta mirip seperti bentuk tapal kuda. Istilah Wilayah Tapal Kuda (WTK) muncul menjelang pelaksanaan Pemilu 1977, yaitu guna mengidentifikasi suatu konsentrasi teritorial wilayah yang pada saat itu rentan terhadap pergolakan sosial, politik, dan keamanan. Berdasarkan sejarahnya, kawasan Tapal Kuda pada zaman Majapahit disebut dengan Blambangan atau Mataraman, karena kawasan ini tidak pernah menjadi

bagian dari kerajaan Mataram, sampai akhirnya beberapa penduduk dari barat berdatangan dan menetap di beberapa kawasan ini pada masa - masa selanjutnya. (Supriono, Rondhi and Kusmiati, 2011).

Kabupaten dan Kota yang berada di kawasan Tapal Kuda terdiri antara lain Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Banyuwangi, dan Kota Probolinggo. Kawasan Tapal Kuda seringkali dianggap menjadi daerah terbelakang di Jawa Timur. Dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Timur, ketertinggalan kawasan Tapal Kuda ditandai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah dan kontradiktif dengan potensi alam yang berlimpah dan jumlah kepadatan penduduk yang relatif lebih rendah. Dari segi pendapatan daerah, kawasan Tapal Kuda masih terbelakang, demikian pula dengan pembangunan infrastruktur lainnya (Soejono, Supriono and Ridjal, 2011).

Gambar 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Kawasan Tapal Kuda Tahun 2015-2019

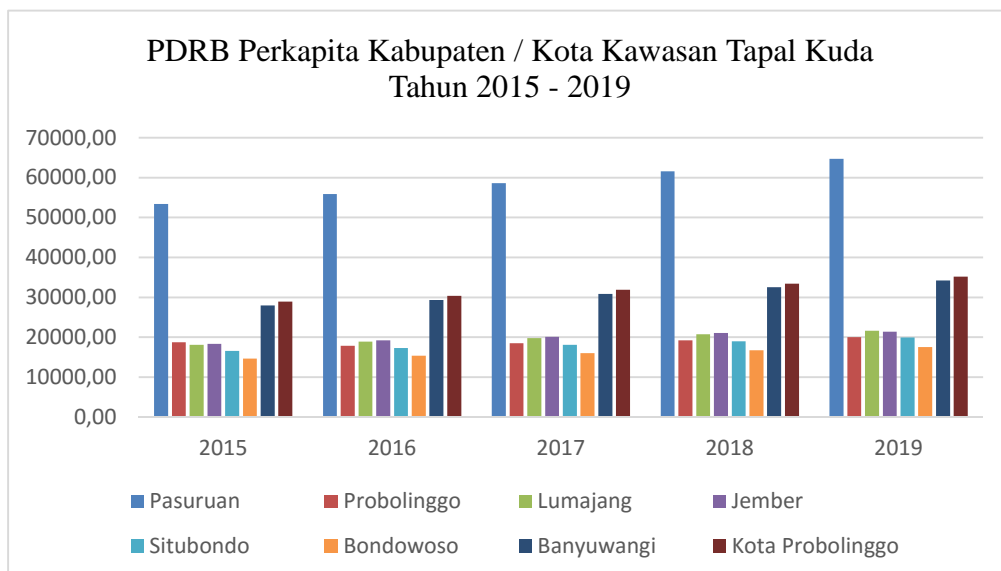


Sumber : (BPS, 2020) (data diolah)

Pertumbuhan ekonomi kawasan Tapal Kuda pada periode 2015 - 2019 cenderung mengalami fluktuatif. Selama periode tersebut, hanya Kota Probolinggo dan Kabupaten Pasuruan yang mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi. Berdasarkan grafik 1.2 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015 Kota Probolinggo memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 5,86% dan pada tahun 2019 meningkat sebesar 5,94%. Kemudian pada tahun 2015 Kabupaten Pasuruan memiliki nilai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,38% yang meningkat menjadi 5,83% pada tahun 2019. Sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah dan fluktuatif diduduki oleh Kabupaten Lumajang, dimana pada tahun 2015 dengan angka sebesar 4,62% dan tahun 2019 menjadi 4,77%. Angka tersebut jauh di bawah dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur, dimana pada tahun 2015 sebesar 5,44% dan 5,52% pada tahun 2019.

Gambar 1.3

PDRB Perkapita Kabupaten / Kota Kawasan Tapal Kuda Tahun 2015 - 2019



Sumber : (BPS, 2020) (data diolah)

Selama kurun waktu lima tahun ini, nilai PDRB perkapita masing – masing Kabupaten atau Kota di Kawasan Tapal Kuda memiliki nilai yang bervariasi dan cenderung mengalami peningkatan. Pada periode 2015 – 2019, Kabupaten Pasuruan dan Kota Probolinggo memiliki PDRB perkapita tertinggi diantara daerah lainnya yang berada di kawasan Tapal Kuda. Pada tahun 2015 Kabupaten Pasuruan memiliki PDRB tertinggi dengan angka 53.367,31 dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 64.735,98. Sedangkan pada posisi kedua tertinggi diduduki oleh Kota Probolinggo, dimana pada tahun 2015 memiliki nilai PDRB perkapita sebesar 28.944,88 dan meningkat menjadi 35.135,82 pada tahun 2019. Hal ini justru berbanding terbalik dengan PDRB perkapita Kabupaten Bondowoso, dimana pada tahun 2015 hanya mencapai 14.686,74 dan tahun 2019 sebesar 17.580,38. Dan angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan PDRB perkapita Provinsi Jawa Timur, dimana pada tahun 2015 sebesar 34.271,81 dan pada 2019 mencapai angka 41.566,75.

Kabupaten Pasuruan pada periode 2015 – 2019 memiliki pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita tertinggi dikarenakan struktur ekonominya didominasi oleh sektor industri dan pengolahan, sedangkan Kota Probolinggo memiliki pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita tertinggi kedua dikarenakan struktur ekonominya didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian. Sedangkan daerah lainnya pada kawasan Tapal Kuda struktur ekonominya di dominasi oleh sektor pertanian, hal ini disebabkan oleh perbedaan potensi yang dimiliki oleh masing – masing daerah. Selain itu Kabupaten Lumajang memiliki pertumbuhan ekonomi terendah dan Kabupaten Bondowoso memiliki PDRB Perkapita terendah yang jauh dari rata

- rata Provinsi Jawa Timur. Adanya perbedaan nilai pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita, menyebabkan terjadinya ketimpangan antar Kabupaten dan Kota di Kawasan Tapal Kuda.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan analisa lebih lanjut terkait dengan ketimpangan antar Kabupaten/Kota di Kawasan Tapal Kuda. Kemudian menentukan sektor unggulan di setiap Kabupaten/Kota agar pertumbuhan ekonomi dapat tercapai secara optimal dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga ketimpangan yang terjadi dimasyarakat menjadi lebih rendah. Sehingga perlu dilakukan penelitian tentang **“Analisis Disparitas Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Kawasan Tapal Kuda Provinsi Jawa Timur”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa saja sektor – sektor yang berpotensi untuk dikembangkan agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Kawasan Tapal Kuda?
2. Bagaimana Klassifikasi Kabupaten/Kota yang ada di Kawasan Tapal Kuda?
3. Bagaimana tingkat disparitas pendapatan antar Kabupaten/Kota di Kawasan Tapal Kuda?
4. Apakah hipotesis kuznets berlaku di Kabupaten/Kota di Kawasan Tapal Kuda?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui sektor – sektor yang berpotensi untuk dikembangkan agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota kawasan Tapal Kuda.
2. Mengetahui klasifikasi Kabupaten/Kota di kawasan Tapal Kuda.
3. Mengetahui kondisi tingkat disparitas pendapatan antar Kabupaten/Kota di kawasan Tapal Kuda.
4. Mengetahui apakah hipotesis kuznets berlaku di Kabupaten/Kota di kawasan Tapal Kuda.

1.4 Ruang Lingkup

Penelitian ini mempunyai batasan yaitu :

1. Menganalisis potensi pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan ekonomi di wilayah Tapal Kuda Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 – 2019.
2. Wilayah yang diteliti yaitu 9 kabupaten / kota yang termasuk di kawasan Tapal Kuda yaitu Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Banyuwangi, Kota Pasuruan, dan Kota Probolinggo.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah khususnya permasalahan sektor – sektor yang berpotensi untuk dikembangkan agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, klasifikasi pola dan struktur pertumbuhan ekonomi, kondisi tingkat disparitas pendapatan, dan apakah hipotesis kuznets

berlaku di Kabupaten/Kota di kawasan Tapal Kuda guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.